

Membuat template storyboard untuk digunakan oleh widyaiswara dan instruktur

Word File Edit View Insert Format Tools Table Window Help

AutoSave 100% Tue 7 Oct 13:43:50

Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View

Comments Editing Share

Font: Arial, 11, Bold, Italic, Underline, Color, Background Color, Bullets, Numbering, Indentation, Paragraph, Styles, Dictate, Add-ins, Editor

Page 2 of 5 1209 words Indonesian

147%

docs.google.com/document/d/1N9oW9p38mak1Bxz_XRvgFBBwpWMOHKMs/edit

File Edit View Insert Format Tools Help

100% Normal text Arial 11 Bold Italic Underline Color Background Color Bullets Numbering Indentation Paragraph Styles Dictate Add-ins Editor

ment tabs

Tab 1

Catatan Produksi

Storyboard

PERTANYAAN PEMBUKA

DEFINISI PENEGAKAN ...

TUJUAN PENEGAKAN ...

URGENSI PENEGAKAN ...

LEMBAGA-LEMBAGA P...

SUBJEK HUKUM DAN S...

JENIS-JENIS TINDAK PL...

SANKSI-SANKSI PIDAN...

RANCANGAN STORYBOARD VIDEO OSL

Judul: HUKUM PERTAMBANGAN LANJUTAN

Topik/Bab: Modul 1 Bab 1: Penegakan Hukum Pidana di Sektor Pertambangan

Penyusun: Imam Miftahul Khaira. B.CS

Tanggal: 28 Agustus 2025

Catatan Produksi

1. Durasi maksimal 7 menit.
2. Narasi maksimal 1800 kata.
3. Langsung fokus pada isi topik, tidak perlu membuat salam pembukaan.
4. Visual dapat berupa saran atau gambar / link pendukung.
5. Jika perlu, Sertakan visual dalam bentuk gambar (diagram, peta, Infografis, etc.)
6. Pastikan narasi mengandung semua materi yang diperlukan untuk menjawab soal latihan.
7. Sisipkan hook question (pertanyaan yang langsung dijawab) untuk menjaga fokus penonton.

Storyboard

Visual	Narasi	Catatan
• Video cuplikan berita tambang merusak sungai. • Video cuplikan berita pelaku tambang ilegal ditangkap.	PERTANYAAN PEMBUKA Pernahkah Anda membayangkan betapa kompleksnya penegakan hukum di sektor pertambangan? Bayangkan saja, ketika sebuah perusahaan tambang melakukan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem sungai, atau ketika terjadi praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah.	
• Ilustrasi aparat sebagai penanggung jawab • Ilustrasi timbangan sebagai proses hukum • Ilustrasi borgol sebagai penjatihan sanksi	Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana proses hukumnya? Dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan? Kali ini, kita akan menjelajahi dunia penegakan hukum pidana di sektor pertambangan - sebuah mekanisme vital yang menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan	

DOKUMENTASI KEGIATAN 2025/10/07/A2

Membuat template storyboard untuk digunakan oleh widyaiswara dan instruktur

docs.google.com/document/d/1N9oW9p38mak1Bxz_XRvgFBBwpWMOHKMs/edit

TEMPLATE RANCANGAN STORYBOARD

Document tabs: Tab 1

Catatan Produksi

Storyboard

PERTANYAAN PEMBUKA

DEFINISI PENEGAKAN ...

TUJUAN PENEGAKAN ...

URGENSI PENEGAKAN ...

LEMBAGA-LEMBAGA P...

SUBJEK HUKUM DAN S...

JENIS-JENIS TINDAK PL...

SANKSI-SANKSI PIDAN...

	Keempat, menjual atau memanfaatkan produk tambang ilegal. Kelima, memindahtangankan izin secara ilegal. Keenam, tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Ketujuh, menghalangi kegiatan pertambangan yang sah. Dan kedelapan, tindak pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang terkait.	
ilustrasi tali gantungan untuk hukuman mati ilustrasi sel bui untuk kurungan singkat ilustrasi jeruji besi untuk kurungan panjang ilustrasi tumpukan uang sebagai denda 	SANKSI-SANKSI PIDANA (POKOK, TAMBAHAN dan KHUSUS) Konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana di sektor pertambangan adalah pemberian sanksi yang bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Pidana pokok merupakan sanksi utama yang terdiri dari empat jenis. Pidana mati untuk kejahatan luar biasa yang menimbulkan korban jiwa massal, meski penerapannya sangat terbatas. Pidana penjara untuk tindak pidana berat seperti tambang ilegal berskala besar. Pidana kurungan untuk pelanggaran ringan dengan jangka waktu lebih singkat. Dan pidana denda sebagai sanksi finansial yang umum digunakan untuk pelanggaran administratif. Pidana tambahan berfungsi menambah efek jera dan memulihkan kerugian. Ini dapat berupa perampasan keuntungan hasil kejahatan, rehabilitasi lingkungan, pencabutan hak-hak tertentu, atau pengumuman putusan secara terbuka. Undang-undang sektoral juga mengatur sanksi khusus seperti kewajiban reklamasi, penutupan lokasi tambang ilegal, dan pencabutan izin usaha. Sanksi ini dirancang untuk memberikan keadilan substantif dan perlindungan lingkungan yang maksimal. Khusus untuk korporasi, sanksi dapat berupa denda dalam jumlah besar, pencabutan izin usaha, pembekuan operasional, hingga perampasan aset. Pertanggungjawaban korporasi juga memungkinkan penjatuhan sanksi kepada pengurus yang mengetahui dan membiarkan kejahatan terjadi.	